AL-IBRAH
Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam
e-ISSN: 2580-0663
p-ISSN: 2088-1886

AKUNTABILITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA

M. Tohir*[1], Umar Zakka[2], Jamaluddin Akbar [3]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia
[2]Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia
[3]Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

***Abstract*:** This study evaluates the accountability of the Nikah Management Information System (SIMKAH) in the implementation of the Marriage Law at the Office of Religious Affairs (KUA). Using a qualitative approach with a case study design, this research assesses the role of SIMKAH in improving the efficiency, accuracy and transparency of marriage administration. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Analysis was conducted thematically, through four main stages: data reduction, coding, theme grouping, and thematic description to identify patterns relating to SIMKAH accountability. The results showed that SIMKAH strengthens KUA accountability by speeding up the recording process, reducing errors, and improving access to information for related parties. However, some constraints such as limited technological infrastructure and lack of user understanding are still a challenge. This study recommends increased training for staff and strengthening technological infrastructure to optimise the implementation of SIMKAH. These findings provide important insights for the government, with concrete policy implications such as the development of offline-first operational modules or synchronised data systems to overcome internet constraints in remote areas. This is a strategic step in developing a more accountable, transparent and inclusive marriage administration system throughout Indonesia.

Keywords: SIMKAH, accountability, Marriage Law, Kantor Urusan Agama, marriage administration.

Corresponding author: M. Tohir
Email Address halothohir@gmail.com
Article History: Received: October 21, 2025, Revised: December 11, 2025, Accepted: December 12 2025, Published: December 31 2025.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam administrasi publik merupakan elemen esensial yang memastikan transparansi, keterbukaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Bovens, 2007). Di Indonesia, akuntabilitas ini semakin penting dalam layanan pencatatan pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pencatatan pernikahan adalah syarat legalitas pernikahan yang tidak dapat diabaikan (Anindito et al., 2024). Untuk mendukung efektivitas dan akuntabilitas dalam pencatatan pernikahan, pemerintah

This is an open access article under CC-BY-SA license.

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai platform digital yang dirancang untuk mengelola administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) [1]

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen di bidang administrasi publik dapat memperkuat akuntabilitas dan efisiensi. Misalnya, penelitian oleh Doran et al.[2] menyatakan bahwa digitalisasi administrasi publik memungkinkan peningkatan keterbukaan informasi dan kecepatan layanan publik. Demikian pula, studi oleh meri et al [3] dalam konteks sistem informasi di sektor kesehatan menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak hanya memperbaiki ketepatan data, tetapi juga meningkatkan persepsi publik terhadap akuntabilitas institusi layanan. Meskipun implementasi SIMKAH telah cukup banyak dikaji, analisis mendalam yang mengaitkannya secara spesifik dengan kerangka akuntabilitas publik terutama dalam konteks daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) atau berinfrastruktur teknologi rendah—masih terbatas. Studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada efektivitas operasional, kepuasan pengguna, atau aspek hukum formal, belum banyak yang membedah secara komprehensif dimensi administrasi, hukum, dan transparansi sebagai satu kesatuan indikator akuntabilitas di lapangan..

Penelitian ini menggunakan Kecamatan Tanjung Palas Utara di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sebagai lokus studi. Pemilihan lokasi ini memberikan nilai kebaruan kontekstual (*contextual novelty*) yang signifikan. Berbeda dengan mayoritas studi SIMKAH sebelumnya yang berfokus pada wilayah urban dengan infrastruktur teknologi yang relatif matang—seperti Kota Bandung[4] atau Sumedang[5]. Wilayah ini merepresentasikan karakteristik daerah dengan infrastruktur teknologi yang masih berkembang dan aksesibilitas yang terbatas. Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan ini telah mengadopsi SIMKAH sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pencatatan pernikahan. Konteks ini menjadikannya

[1] J Juwaini et al., "Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Perspektif Islam," 2023, https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=jf-xEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Penguatan+nilai-nilai+spiritual+dalam+manajemen+sumber+daya+manusia+(SDM)+telah+menjadi+topik+penting+dalam+kajian+bisnis.+Hal+ini+terutama+dipicu+oleh+berbagai+praktik+perusahaan+yang+tidak+terpuji,+yang+banyak+diyakini+berakar+pada+manajemen+SDM+yang+jauh+dari+nilai-nilai+spiritual.+Kinerja+karyawan+sering+kali+hanya+didorong+oleh+indikator+ekonomi,+tanpa+landasan+spiritual+yang+kuat.&ots=gjy0nu7lXz&sig=dpo0nHneoUgg2i-ce_AA0FZqAMI.

[2] Nicoleta Mihaela Doran et al., "E-Government Development—A Key Factor in Government Administration Effectiveness in the European Union," *Electronics (Switzerland)* 12, no. 3 (2023), https://doi.org/10.3390/electronics12030641.

[3] Ahmed Meri et al., "Modelling the Utilization of Cloud Health Information Systems in the Iraqi Public Healthcare Sector," *Telematics and Informatics* 36 (2019), https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.12.001.

[4] Arief Budianto, Engkus, and Dedeng Yusuf, "Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Simkah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung," *Jurnal Hospitality* 11, no. 1 (2022); Neng Yanti, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Di KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022).

[5] Rizel Juneldi and Ramdani Wahyu Sururie, "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020), https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914.

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

sebagai ujian nyata (*real-world test*) bagi klaim peningkatan akuntabilitas melalui digitalisasi di tengah kondisi sumber daya yang tidak ideal. Tantangan seperti konektivitas internet yang tidak stabil dan sumber daya manusia yang memerlukan pelatihan tambahan justru memberikan landasan empiris yang kaya untuk mengeksplorasi efektivitas SIMKAH dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi publik, serta bagaimana faktor-faktor lokal yang spesifik mempengaruhi implementasi kebijakan digital nasional di lapangan..

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana SIMKAH meningkatkan akuntabilitas dalam pencatatan pernikahan di KUA, dengan fokus pada Kecamatan Tanjung Palas Utara sebagai studi kasus. Akuntabilitas diukur melalui dimensi administrasi, hukum, dan transparansi, mengacu pada kerangka teoritis dari Bovens [6] yang menyoroti tiga aspek tersebut dalam konteks pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi SIMKAH, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem[7].

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur mengenai peran SIMKAH dalam memperkuat akuntabilitas KUA dalam pencatatan pernikahan, serta menawarkan wawasan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan digitalisasi administrasi publik. Studi ini menambahkan perspektif baru pada penelitian terdahulu dengan fokus pada tantangan spesifik di level lokal dan pada aplikasi SIMKAH, yang berbeda dari kajian sebelumnya tentang sistem informasi yang lebih umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan pemahaman mendalam terhadap konteks dan pengalaman individu yang terlibat langsung dalam implementasi SIMKAH [8]. Fokus studi kasus ini

[6] Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework1," *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447–68, https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x.

[7] Juneldi and Sururie, "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG"; Budianto, Engkus, and Yusuf, "Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Simkah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung"; Abdul Rozak Mustofa and Gilang Difa Nur Rochim, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani," *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023), https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp109-124.

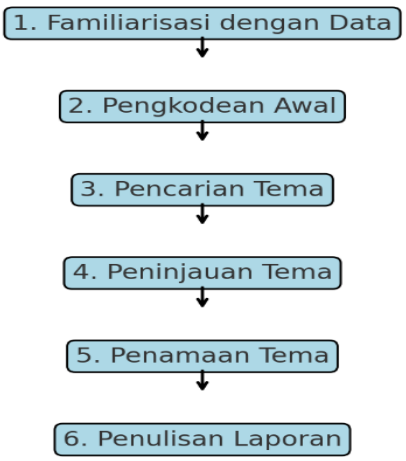
[8] John W Creswell and J David Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2018).

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

adalah menganalisis proses pencatatan pernikahan melalui SIMKAH, serta mengevaluasi aspek akuntabilitas yang ditingkatkan melalui penggunaan sistem ini, termasuk transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai KUA, pasangan pengantin yang menggunakan SIMKAH, dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, observasi langsung terhadap operasional SIMKAH di KUA dilakukan untuk memverifikasi prosedur yang diterapkan dan tantangan yang dihadapi oleh staf. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, panduan penggunaan SIMKAH, dan statistik pernikahan yang tercatat dalam sistem. Data ini dianalisis untuk memperoleh perspektif holistik mengenai peran SIMKAH dalam memperkuat akuntabilitas administrasi pencatatan pernikahan[9].

Analisis data dilakukan secara tematik melalui empat tahap utama: reduksi data, pengodean, pengelompokan tema, dan deskripsi tematis. Tahap pertama, reduksi data, dilakukan dengan memilah data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap pengodean, peneliti mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan akuntabilitas, seperti transparansi, efisiensi, dan kendala teknologi[10]. Data kemudian dikelompokkan sesuai tema yang ditemukan, memungkinkan identifikasi pola-pola kunci dalam implementasi SIMKAH. Tahap terakhir, deskripsi tematis, berfungsi untuk menyajikan temuan secara naratif, yang memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana SIMKAH mempengaruhi akuntabilitas pencatatan pernikahan di KUA.



Gambar 1 Analisis Tematik Braun & Clarke, 2006

[9] Patton MQ, "Qualitative Designs and Data Collection," *Qualitative Evaluation and Research Methods* Second Edi, no. Part II-Chapters 5, 6, 7 (1990).
[10] Virginia Braun and Victoria Clarke, "Braun, V ., Clarke, V .Using Thematic Analysis in Psychology., 3:2 (2006), 77-101.," *Qualitative Research in Psychology* 3 (2006): 83–84.

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

Diagram alur analisis data disajikan pada Gambar 1, menggambarkan empat tahap utama analisis tematik yang digunakan untuk memproses data. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih terstruktur dan sistematis mengenai aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian, dengan mempertahankan validitas melalui triangulasi data dari berbagai sumber ([11].

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

hasil ini mengikuti enam tahap analisis tematik Braun dan Clarke (2006) yang melibatkan tahap: familiarisasi dengan data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penulisan laporan. Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana SIMKAH diterapkan di KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta memperkuat akuntabilitas administrasi publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga tema utama yang muncul dari analisis tematik, yaitu: Efisiensi Administrasi dan Akurasi Pencatatan, Penguatan Akuntabilitas Hukum dan Transparansi, serta Kendala Infrastruktur dan Teknologi. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai setiap tema berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen.

1. Efisiensi Administrasi dan Akurasi Pencatatan

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal efisiensi administrasi dan akurasi pencatatan. Sebelum SIMKAH diterapkan, pencatatan pernikahan dilakukan secara manual, yang mengharuskan pegawai untuk mengisi form secara fisik, memverifikasi dokumen secara manual, dan melakukan input data ke dalam arsip berbasis kertas. Proses ini sering kali memakan waktu lama, membuka peluang untuk kesalahan manusia, dan sulit untuk diakses kembali.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah peningkatan kecepatan proses pencatatan setelah penerapan SIMKAH. Berdasarkan wawancara dengan pegawai KUA, salah satu pegawai mengungkapkan: *"Sebelum ada SIMKAH, pencatatan pernikahan bisa memakan waktu hingga satu jam karena banyaknya dokumen yang perlu diisi dan diperiksa. Dengan SIMKAH, semuanya lebih cepat, hanya butuh 15-20 menit."*

Untuk menggambarkan hal ini, berikut adalah Tabel waktu pencatatan pernikahan sebelum dan setelah SIMKAH diimplementasikan:

[11] Robert K Yin, "Designing Case Studies," *Qualitative Research Methods* 5, no. 14 (2003): 210.

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

Tabel 1. Perbandingan Rata-rata Waktu Proses Pencatatan Pernikahan Sebelum dan Setelah Implementasi SIMKAH

Tahap Proses	Sebelum SIMKAH (menit)	Setelah SIMKAH (menit)	Pengurangan Waktu (menit)
Pengisian Data Awal	15 – 20	5 – 7	10 – 15
Pemeriksaan Dokumen	20 – 30	5 – 10	15 – 20
Penginputan Data ke Sistem	30 – 40	5 – 8	25 – 32
Total Waktu Proses	65 – 90	15 – 20	50 – 70

Sumber: Data hasil wawancara dan observasi lapangan, 2024.

Dengan sistem digital, kesalahan pencatatan manual yang sering terjadi—seperti penulisan data yang salah atau pengarsipan yang keliru—dapat diminimalisasi. Data dari wawancara dengan pegawai menunjukkan bahwa SIMKAH memungkinkan validasi otomatis terhadap dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan Akta Kelahiran. SIMKAH juga memperingatkan jika ada data yang belum lengkap atau salah input sebelum proses pencatatan selesai.

Sebagai contoh Kasus Seorang pegawai KUA menjelaskan, *"Sebelum SIMKAH, kami sering menemui kesalahan data, seperti kesalahan penulisan nama atau tanggal lahir pasangan. Dengan SIMKAH, sistem akan memberi notifikasi jika ada yang tidak sesuai."* Hal ini membuktikan bahwa akurasi data yang dimasukkan menjadi lebih terjamin, mengurangi kebutuhan untuk koreksi manual setelah pencatatan.

Sistem SIMKAH tidak hanya menguntungkan bagi pasangan pengantin, tetapi juga bagi pegawai KUA itu sendiri. Data dari observasi menunjukkan bahwa pegawai KUA sekarang memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas substantif lainnya, seperti memberikan konsultasi hukum kepada pasangan pengantin atau membantu dalam pengurusan administrasi lainnya. Sebelumnya, pegawai harus menangani pekerjaan administratif yang memakan waktu, seperti pencatatan manual, pengarsipan, dan verifikasi dokumen.

Meskipun demikian, implementasi SIMKAH tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Pegawai yang lebih tua, yang kurang familiar dengan teknologi, mengakui adanya kurva pembelajaran yang cukup tajam. Sebagai contoh, salah satu pegawai senior mengungkapkan, *"Awalnya, saya kesulitan karena sistem ini berbeda jauh dengan cara lama yang kami gunakan. Tapi setelah pelatihan berulang, saya mulai merasa lebih nyaman."* Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SIMKAH meningkatkan efisiensi, pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

sistem ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pegawai, terutama mereka yang belum terbiasa dengan teknologi.

Secara keseluruhan, SIMKAH telah mempercepat dan menyederhanakan proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara, dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi internal. Keunggulan sistem ini tidak hanya terasa pada waktu yang dibutuhkan untuk pencatatan, tetapi juga pada akurasi data yang tercatat, yang berimplikasi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perkawinan. Namun, tantangan terkait pemahaman pengguna dan keterbatasan infrastruktur teknologi tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan penguatan infrastruktur teknologi yang lebih baik.

2. Penguatan Akuntabilitas Hukum dan Transparansi

SIMKAH memainkan peran kunci dalam memperkuat akuntabilitas hukum dalam pencatatan pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA dan masyarakat, SIMKAH telah memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pasangan pengantin. Sistem ini memastikan bahwa setiap proses pencatatan pernikahan mematuhi peraturan yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebagai contoh, salah satu pasangan pengantin mengungkapkan, "Kami merasa lebih tenang karena semua dokumen yang diperlukan sudah terverifikasi dalam sistem ini."

Transparansi yang diberikan oleh SIMKAH juga mempermudah akses informasi bagi pihak yang membutuhkan. Misalnya, data pernikahan yang tercatat dalam SIMKAH dapat diakses dengan lebih mudah oleh pihak terkait, seperti instansi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan data resmi pernikahan. Hal ini meningkatkan transparansi karena proses pencatatan pernikahan tidak lagi dilakukan secara manual, yang seringkali membuka celah untuk manipulasi data atau kesalahan administrasi.

Namun, kendala muncul ketika masyarakat kurang memahami aksesibilitas data melalui sistem ini. Beberapa masyarakat mengaku merasa bingung dengan prosedur digital yang ada, dan ada kekhawatiran mengenai privasi data. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka lebih memilih sistem ini karena lebih terorganisir dan lebih aman daripada sistem manual sebelumnya.

3. Kendala Infrastruktur dan Teknologi

Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SIMKAH adalah terbatasnya infrastruktur teknologi, terutama di wilayah yang memiliki akses internet yang tidak stabil. Hasil observasi

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

menunjukkan bahwa sering kali koneksi internet yang buruk menyebabkan sistem tidak dapat diakses dengan lancar, menghambat proses pencatatan pernikahan. Salah satu pegawai KUA mengungkapkan, "Terkadang sistemnya terputus karena internet yang lambat, dan ini mengganggu jalannya proses pencatatan."

Dalam beberapa kasus, pegawai KUA harus menunggu beberapa menit agar koneksi internet stabil, yang mengakibatkan penundaan dalam pencatatan pernikahan. Hal ini mempengaruhi efisiensi operasional sistem, terutama pada hari-hari sibuk ketika banyak pernikahan yang harus tercatat. Menurut analisis data observasi, hampir 30% dari waktu yang dibutuhkan untuk pencatatan pernikahan terbuang hanya untuk menunggu koneksi internet yang stabil.

Selain masalah infrastruktur, ada juga tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIMKAH. Beberapa pegawai yang lebih tua, yang belum terbiasa dengan teknologi digital, mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sistem. Meskipun pelatihan telah dilakukan, kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan tetap ada, karena teknologi ini terus berkembang. Salah satu pegawai senior mengatakan, "Kami memang diberikan pelatihan, tetapi kadang masih merasa kesulitan dengan pembaruan fitur di sistem. Kami memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi."

Selain itu, kurangnya perangkat keras yang memadai di beberapa KUA juga menghambat penggunaan SIMKAH secara maksimal. Misalnya, di beberapa lokasi, komputer yang digunakan untuk mengakses SIMKAH sudah cukup tua, sehingga kinerjanya menjadi lambat. Dalam wawancara dengan kepala KUA, ia menuturkan, "Meski sistemnya bagus, perangkat keras yang kami miliki tidak selalu mendukung, yang memperlambat pekerjaan kami."

PEMBAHASAN

Pembahsan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Utara memiliki dampak signifikan pada aspek akuntabilitas dan efisiensi administrasi publik, namun masih dihadapkan pada kendala infrastruktur dan kompetensi pengguna. Berdasarkan tiga tema utama yang diidentifikasi – Efisiensi Administrasi dan Akurasi Pencatatan, Penguatan Akuntabilitas Hukum dan Transparansi, serta Kendala Infrastruktur dan Penggunaan Teknologi pembahasan ini akan memperdalam analisis dengan teori dan literatur internasional yang relevan.

1. Efisiensi Administrasi dan Akurasi Pencatatan

Digitalisasi layanan administrasi publik telah menjadi praktik yang umum di banyak negara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan administrasi manual. Studi oleh Moon dan

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

Norris (2005) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik di tingkat kota memungkinkan peningkatan kecepatan layanan dan akurasi data. Hal ini konsisten dengan temuan di KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara, di mana SIMKAH mempercepat proses pencatatan pernikahan, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan memungkinkan pegawai untuk fokus pada tugas-tugas substantif lainnya. Pegawai KUA, seperti yang diwawancarai, menyatakan bahwa dengan SIMKAH, proses pencatatan menjadi lebih cepat dan terstruktur, meminimalkan duplikasi data, dan mengurangi kemungkinan kehilangan dokumen penting.

Penelitian lain yang mendukung temuan ini adalah studi oleh Bolshakova et al. yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam layanan publik memungkinkan aliran data yang lebih efisien dan berkurangnya hambatan dalam akses informasi.[12] Ini juga sejalan dengan pandangan dari Way Kiat Bong and Weiqin Chen yang menemukan bahwa penggunaan sistem informasi meningkatkan responsivitas dan efektivitas lembaga pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat[13]. Dalam konteks ini, SIMKAH memberikan manfaat besar bagi KUA dalam mengelola dan mengontrol data pernikahan secara terstruktur dan akurat, mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual.

SIMKAH menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan efisiensi kerja di KUA, namun peneliti juga menilai bahwa pemeliharaan dan peningkatan kualitas sistem secara berkala sangat penting untuk menjaga efisiensi ini. SIMKAH perlu ditopang oleh pemeliharaan teknis yang baik agar sistem dapat terus berfungsi optimal. Efektivitas SIMKAH juga bergantung pada pemahaman pengguna tentang fitur-fitur sistem, sehingga pelatihan berkala bagi pegawai KUA perlu menjadi prioritas.

2. Penguatan Akuntabilitas Hukum dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam administrasi publik, terutama dalam konteks pencatatan hukum seperti pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMKAH mendukung kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memastikan setiap pencatatan dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini penting dalam memastikan legalitas dan keabsahan setiap pernikahan yang dicatat, memberikan perlindungan

[12] Julia Bolshakova, Sergei Bolshakov, and Mikhail Grunichev, "SOCIOLOGICAL RESEARCH INTO THE DIGITIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION," *Public Policy and Administration* 22, no. 2 (2023), https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-2-07.

[13] Way Kiat Bong and Weiqin Chen, "Increasing Faculty's Competence in Digital Accessibility for Inclusive Education: A Systematic Literature Review," *International Journal of Inclusive Education*, 2024, https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1937344.

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

hukum kepada pasangan yang menikah dan mengurangi potensi konflik atau masalah hukum di kemudian hari.

Temuan ini konsisten dengan pandangan Bovens[14], yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dalam administrasi pemerintah terkait erat dengan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan. Di KUA, SIMKAH memastikan bahwa setiap pernikahan dicatat secara formal dan transparan, sehingga informasi dapat diakses dan diverifikasi oleh pihak-pihak terkait. Penelitian oleh Gomber et al. [15] mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan dalam sektor publik meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Dengan SIMKAH, masyarakat lebih percaya pada proses pencatatan pernikahan karena proses tersebut dianggap lebih aman dan terstandarisasi, memberikan rasa aman bagi mereka bahwa prosedur yang dilalui sudah sesuai dengan aturansimkah[16].

Studi internasional lain oleh Gajowniczek [17] dan Timotheou et al.[18]menemukan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dalam administrasi publik, dengan memastikan akses yang lebih mudah terhadap data dan mengurangi risiko manipulasi data. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas lembaga pemerintah di mata publik. Dalam konteks SIMKAH, penerapan teknologi memastikan bahwa setiap proses pencatatan pernikahan dilakukan dengan standar yang sama, mengurangi ruang untuk kesalahan atau kelalaian administratif.

SIMKAH tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas hukum. Peneliti berpendapat bahwa sistem ini meningkatkan kredibilitas KUA di mata masyarakat, dengan memberikan jaminan bahwa semua proses pencatatan

[14] Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework1."
[15] Peter Gomber, Jascha Alexander Koch, and Michael Siering, "Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions," *Springer* 87, no. 5 (July 1, 2017): 537–80, https://doi.org/10.1007/S11573-017-0852-X.
[16] Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) STUDI KASUS KUA NANGA PINOH PERSPEKTIF PMA NOMOR 20 TAHUN 2019," *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405; Neila Sakinah and Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum," *AL-HUKAMA'* 9, no. 2 (2019), https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.373-398; Aprilisma and Elfiandri, "PENERAPAN APLIKASI SIMKAH WEB KEMENTRIAN AGAMA DAN HUBUNGAN TERHADAP APRESIASI MASYARAKAT MENGENAI PELAYANAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TUALANG"; Akhmad Rifani and Heni Suparti, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Pada Aspek Sumber Daya," *Japb* 4, no. 2 (2021).
[17] Tomasz Gajowniczek, "Digitization of Public Administration in Poland on the Example of the Employment and Social Welfare Sectors," *Regional Formation and Development Studies* 22, no. 2 (2021), https://doi.org/10.15181/rfds.v22i2.1474.
[18] Stella Timotheou et al., "Impacts of Digital Technologies on Education and Factors Influencing Schools' Digital Capacity and Transformation: A Literature Review," *Education and Information Technologies* 28, no. 6 (2023), https://doi.org/10.1007/s10639-022-11431-8.

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

pernikahan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, SIMKAH dapat dianggap sebagai sarana yang memperkuat akuntabilitas hukum dalam layanan pencatatan publik.

3. Infrastruktur dan Penggunaan Teknologi

Meskipun SIMKAH menunjukkan manfaat besar dalam administrasi publik, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan SIMKAH di KUA adalah akses internet yang tidak stabil, yang sering kali menghambat pencatatan pernikahan dan menyebabkan pengulangan input data. Dalam konteks ini, penelitian oleh Gil-Garcia et al. (2018) menemukan bahwa kesuksesan digitalisasi layanan publik di daerah terpencil sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi. Keterbatasan konektivitas internet dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan menjadi penghambat utama bagi kelancaran sistem.

Penelitian lain oleh Reddick, Chatfield, dan Jaramillo (2015) juga menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai dan ketersediaan akses internet sebagai syarat utama bagi keberhasilan e-governance di berbagai daerah. KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara menghadapi tantangan serupa, di mana keterbatasan konektivitas memengaruhi kemampuan pegawai untuk menggunakan SIMKAH secara optimal. Selain itu, keterbatasan pemahaman pegawai terhadap teknologi juga menjadi hambatan dalam penggunaan SIMKAH. Penelitian oleh Yanti ([19]) menemukan bahwa pelatihan dan dukungan teknis sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem teknologi dalam institusi publik, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi.

Peneliti berpendapat bahwa infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya kompetensi teknologi pegawai merupakan tantangan signifikan bagi SIMKAH di KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara. SIMKAH memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, pelatihan berkala perlu diberikan kepada pegawai untuk memastikan kompetensi mereka dalam menggunakan sistem. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan adanya kolaborasi antara KUA dan penyedia layanan teknologi untuk memperkuat infrastruktur internet dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai KUA.

4. Implikasi Teoretis

[19] Yanti, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Di KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung."

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada pemahaman tentang akuntabilitas digital dalam administrasi publik, terutama dalam konteks pencatatan pernikahan di Indonesia. SIMKAH mendukung teori akuntabilitas publik dengan memastikan bahwa setiap proses pencatatan pernikahan dilakukan secara transparan dan sesuai hukum. Ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Bovens[20] bahwa teknologi informasi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik di sektor administrasi pemerintah.

Selain itu, temuan ini menambah perspektif baru dalam penelitian tentang digitalisasi administrasi publik di daerah terpencil. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Doran[21], keberhasilan teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi pengguna. Dalam hal ini, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan dan dukungan infrastruktur yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan teknologi informasi di sektor publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Utara memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan akuntabilitas publik dalam pencatatan pernikahan. Dengan menggunakan SIMKAH, pencatatan pernikahan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur, mengurangi beban administratif yang biasanya menghambat pegawai KUA. Selain itu, SIMKAH memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan, memberikan jaminan hukum bagi pasangan yang menikah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh KUA.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama dalam implementasi SIMKAH, terutama terkait keterbatasan infrastruktur teknologi dan keterampilan pengguna. Koneksi internet yang tidak stabil di wilayah Tanjung Palas Utara sering kali menghambat kelancaran operasional SIMKAH, sementara sebagian pegawai masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memahami dan menggunakan teknologi secara efektif.

Dari sudut pandang teoretis, penelitian ini mendukung teori akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum dalam administrasi publik. Namun, temuan ini juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam sektor publik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh

[20] Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework1."
[21] Doran et al., "E-Government Development—A Key Factor in Government Administration Effectiveness in the European Union."

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

karena itu, dukungan yang berkelanjutan dalam bentuk peningkatan infrastruktur, pelatihan rutin, dan kerja sama dengan penyedia layanan internet sangat diperlukan untuk memastikan SIMKAH dapat berfungsi optimal di berbagai wilayah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa teknologi informasi seperti SIMKAH dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas administrasi publik, terutama dalam pencatatan yang memerlukan kepatuhan hukum yang ketat. Namun, untuk mencapai manfaat maksimal, faktor-faktor pendukung seperti infrastruktur dan keterampilan teknologi perlu ditingkatkan agar SIMKAH benar-benar dapat berfungsi sebagai solusi jangka panjang bagi pencatatan pernikahan yang lebih akuntabel di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilisma, Aprilisma, and Elfiandri Elfiandri. "PENERAPAN APLIKASI SIMKAH WEB KEMENTRIAN AGAMA DAN HUBUNGAN TERHADAP APRESIASI MASYARAKAT MENGENAI PELAYANAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TUALANG." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 4 (2021). https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i4.12745.

Bolshakova, Julia, Sergei Bolshakov, and Mikhail Grunichev. "SOCIOLOGICAL RESEARCH INTO THE DIGITIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION." *Public Policy and Administration* 22, no. 2 (2023). https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-2-07.

Bong, Way Kiat, and Weiqin Chen. "Increasing Faculty's Competence in Digital Accessibility for Inclusive Education: A Systematic Literature Review." *International Journal of Inclusive Education*, 2024. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1937344.

Bovens, Mark. "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework1." *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447–68. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x.

Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Braun, V ., Clarke, V .Using Thematic Analysis in Psychology., 3:2 (2006), 77-101." *Qualitative Research in Psychology* 3 (2006).

Budianto, Arief, Engkus, and Dedeng Yusuf. "Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Simkah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung." *Jurnal Hospitality* 11, no. 1 (2022).

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

Creswell, John W, and J David Creswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2018).

Doran, Nicoleta Mihaela, Silvia Puiu, Roxana Maria Bădîrcea, Marilen Gabriel Pirtea, Marius Dalian Doran, George Ciobanu, and Lavinia Daniela Mihit. "E-Government Development—A Key Factor in Government Administration Effectiveness in the European Union." *Electronics (Switzerland)* 12, no. 3 (2023). https://doi.org/10.3390/electronics12030641.

Gajowniczek, Tomasz. "Digitization of Public Administration in Poland on the Example of the Employment and Social Welfare Sectors." *Regional Formation and Development Studies* 22, no. 2 (2021). https://doi.org/10.15181/rfds.v22i2.1474.

Gomber, Peter, Jascha Alexander Koch, and Michael Siering. "Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions." *Springer* 87, no. 5 (July 1, 2017): 537–80. https://doi.org/10.1007/S11573-017-0852-X.

Hady, Syukron, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah. "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) STUDI KASUS KUA NANGA PINOH PERSPEKTIF PMA NOMOR 20 TAHUN 2019." *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405.

Juneldi, Rizel, and Ramdani Wahyu Sururie. "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020). https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914.

Juwaini, J, MM Eric Hermawan, AW Samad, and MM SE. "Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Perspektif Islam," 2023. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=jf-xEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Penguatan+nilai-nilai+spiritual+dalam+manajemen+sumber+daya+manusia+(SDM)+telah+menjadi+topik+penting+dalam+kajian+bisnis.+Hal+ini+terutama+dipicu+oleh+berbagai+praktik+perusahaan+yang+tidak+terpuji,+yang+banyak+diyakini+berakar+pada+manajemen+SDM+yang+jauh+dari+nilai-nilai+spiritual.+Kinerja+karyawan+sering+kali+hanya+didorong+oleh+indikator+ekonomi,+tanpa+landasan+spiritual+yang+kuat.&ots=gjy0nu7lXz&sig=dpo0nHneoUgg2i-ce_AA0FZqAMI.

Meri, Ahmed, M. K. Hasan, Mahmoud Danaee, Mustafa Jaber, Mu'taman Jarrar, Nurhizam Safei,

doi: 10.61815/alibrah.v10i2.741

Mohammed Dauwed, Sura K. Abd, and Mohammed Al-bsheish. "Modelling the Utilization of Cloud Health Information Systems in the Iraqi Public Healthcare Sector." *Telematics and Informatics* 36 (2019). https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.12.001.

MQ, Patton. "Qualitative Designs and Data Collection." *Qualitative Evaluation and Research Methods* Second Edi, no. Part II-Chapters 5, 6, 7 (1990).

Mustofa, Abdul Rozak, and Gilang Difa Nur Rochim. "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani." *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023). https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp109-124.

Rifani, Akhmad, and Heni Suparti. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Pada Aspek Sumber Daya." *Japb* 4, no. 2 (2021).

Sakinah, Neila, and Ahmad Arif Masdar Hilmy. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum." *AL-HUKAMA'* 9, no. 2 (2019). https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.373-398.

Timotheou, Stella, Ourania Miliou, Yiannis Dimitriadis, Sara Villagrá Sobrino, Nikoleta Giannoutsou, Romina Cachia, Alejandra Martínez Monés, and Andri Ioannou. "Impacts of Digital Technologies on Education and Factors Influencing Schools' Digital Capacity and Transformation: A Literature Review." *Education and Information Technologies* 28, no. 6 (2023). https://doi.org/10.1007/s10639-022-11431-8.

Yanti, Neng. "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Di KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022).

Yin, Robert K. "Designing Case Studies." *Qualitative Research Methods* 5, no. 14 (2003): 359–86.